

Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik: Studi Pada DISPENDA Pemerintah Daerah Jambi

Desi Melawati^{1*}, Hurian Kamela²

^{1,2}Universitas Terbuka, Tangerang Selatan

Email: 042845975@ecampus.ut.ac.id^{1*}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) oleh pemerintah daerah Jambi dan bagaimana hal itu berdampak pada kualitas layanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada lima puluh staf DISPENDA yang bekerja dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Uji validitas, normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas digunakan untuk menganalisis data dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SAP di DISPENDA Jambi adalah yang terbaik (skor rata-rata 4,21). dengan kualitas layanan publik yang baik (skor rata-rata 4,35). Analisis regresi mengungkapkan bahwa komitmen organisasi (X4) merupakan faktor dominan yang berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas layanan publik (koefisien 1,009). Sementara itu, variabel SAP (X1) dan teknologi informasi (X3) memiliki pengaruh negatif, meskipun tidak signifikan secara praktis. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 74,1% menunjukkan bahwa variabel independen (SAP, SDM, TI, dan komitmen organisasi) mampu menjelaskan 74,1% variasi kualitas layanan publik. Faktor pendukung utama meliputi kompetensi SDM, sistem informasi terintegrasi, dan komitmen organisasi, sedangkan hambatan utamanya adalah keterbatasan pemahaman teknis SAP dan infrastruktur teknologi. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya penguatan pelatihan SDM, optimalisasi sistem informasi akuntansi, dan internalisasi nilai akuntabilitas dalam organisasi. Rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan kapasitas aparatur, integrasi sistem teknologi, serta pembentukan mekanisme monitoring untuk memastikan keberlanjutan implementasi SAP.

Keyword: DISPENDA, Kualitas layanan publik, Komitmen organisasi, Standar akuntansi pemerintahan

PENDAHULUAN

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah salah satu kunci untuk tata kelola pemerintahan yang efektif selama era reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan daerah saat ini. Menurut Mardiasmo (2018), SAP berbasis akrual membantu pemerintah daerah menyusun laporan keuangan dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Dengan menerapkan sistem ini, pemerintah daerah, termasuk Dinas Pendapatan Daerah

(DISPENDA) Pemerintah Daerah Jambi, harus mencatat tidak hanya transaksi berbasis kas, tetapi juga mengakui hak dan kewajiban yang terlibat untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan.

Studi menunjukkan bahwa menggunakan SAP dapat meningkatkan laporan keuangan pemerintah daerah. Nurhasniwati, Handayani, dan Desfiandi (2024) menemukan bahwa penerapan SAP berbasis akrual di BPKAD Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat meningkatkan kualitas laporan keuangan, meskipun ada masalah dengan aspek teknis

dan pemahaman SDM. Sementara itu, Almukaromah (2023) menemukan bahwa pemahaman tentang SAP dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kota Jambi. Hal ini membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan di BPKAD

Dalam penelitian mereka di Pemerintah Kabupaten Bungo, Aprsiansyah, Syafriandi, dan Firmansyah (2020) menemukan bahwa ada korelasi positif antara kualitas laporan keuangan daerah dan kemampuan SDM dan teknologi informasi. Faktor-faktor ini juga merupakan komponen penting yang menentukan keberhasilan penerapan SAP. Selain itu, Saputra dan Siregar (2022) menyatakan bahwa komitmen organisasi dapat memperkuat hubungan antara penerapan SAP dan kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian lain, Octaviana (2023) menemukan bahwa pengalaman kerja aparatur juga mempengaruhi seberapa baik implementasi SAP berjalan.

Menurut Halim (2016), pengelolaan keuangan daerah yang profesional adalah fondasi bagi terciptanya pelayanan publik yang prima. Laporan keuangan yang akurat dan transparan memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih baik, sehingga berimplikasi langsung terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, Riyanto (2015) menekankan bahwa akuntansi pemerintahan bukan sekadar pelaporan keuangan, melainkan juga sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada publik.

Sebaliknya, meningkatkan kualitas layanan publik adalah bagian integral dari proses reformasi birokrasi dan administrasi. Dwiyanto (2017) menyatakan bahwa sistem administrasi yang jelas dan akuntabel harus mendukung pelayanan publik yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah kunci untuk pelayanan publik yang responsif dan efisien, menurut Prasajo (2019). Dalam hal ini, keberhasilan implementasi SAP menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di tingkat daerah.

Dipenda Pemerintah Daerah Jambi sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan karena merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan daerah. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana penerapan SAP di instansi ini dan sejauh mana penerapan tersebut membantu meningkatkan kualitas layanan publik. Diharapkan penelitian ini akan membantu membangun praktik pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan membangun pelayanan publik yang lebih baik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai hasil penelitian sebelumnya dan literatur yang relevan, maka penelitian ini berfokus pada penerapan SAP di DISPENDA Pemerintah Daerah Jambi serta pengaruhnya terhadap kualitas layanan publik, untuk memperkaya kajian akademik dan memberikan masukan bagi praktik pemerintahan di daerah.

Dalam era reformasi birokrasi dan tuntutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual menjadi sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang baik. Pemerintah daerah, termasuk DISPENDA Pemerintah Daerah Jambi, harus mengakui hak dan kewajiban secara akrual selain mencatat transaksi secara kas untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan dan kredibel. Namun, kurangnya pemahaman SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen organisasi adalah beberapa masalah yang menghalangi penggunaan SAP. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan SAP di DISPENDA Pemerintah Daerah Jambi dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan untuk menemukan komponen yang mendukung atau menghambat implementasinya. Oleh karena itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu menciptakan praktik tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan membangun pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif. Selain itu, sebagai tanggapan terhadap perkembangan reformasi birokrasi, Pemerintah Daerah Jambi telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sistem keuangannya. Ini termasuk membentuk tim implementasi SAP, memberikan pelatihan teratur kepada staf, dan membangun sistem informasi keuangan daerah. Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung

pada kejujuran dan kemampuan para pelaksana kebijakan. Jika orang tidak tahu apa arti akuntansi berbasis akrual, SAP hanya akan digunakan secara formal dan tidak akan mengubah banyak hal.

Penting untuk dicatat bahwa transisi dari sistem kas menuju sistem akrual bukan sekadar perubahan teknis, tetapi juga perubahan budaya organisasi. Aparatur pemerintah dituntut untuk meninggalkan praktik-praktik lama dan mulai beradaptasi dengan sistem yang menekankan pada akuntabilitas substansial. Hal ini sejalan dengan teori institusional, yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh desain kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh norma, nilai, dan kebiasaan yang berlaku dalam organisasi.

Dalam konteks ini, pemahaman terhadap SAP berbasis akrual harus disertai dengan perubahan paradigma pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah perlu membangun budaya kerja yang mendukung akuntabilitas dan transparansi. Pelaporan keuangan tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai sarana pertanggungjawaban moral kepada publik. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi kunci dalam memastikan bahwa aparatur memiliki kapasitas dan integritas dalam mengimplementasikan SAP secara efektif.

Aspek teknis, terutama yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi, menyebabkan kesulitan tambahan saat menerapkan SAP. Pencatatan dan pelaporan

keuangan masih dilakukan secara manual atau semi-manual di banyak tempat di mana belum ada sistem informasi yang terintegrasi. Selain mengurangi efisiensi, hal ini meningkatkan kemungkinan kesalahan dan manipulasi data. Untuk DISPENDA Pemerintah Daerah Jambi, sistem informasi keuangan daerah (SIPKD) harus mampu melakukan pencatatan berbasis akrual sepenuhnya.

Selain sistem, aspek kelembagaan juga menjadi krusial. Kelembagaan yang kuat akan memberikan kerangka kerja yang mendukung implementasi SAP, mulai dari perumusan kebijakan, pengawasan internal, hingga audit eksternal. Dalam hal ini, peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan SAP dilakukan sesuai standar dan prinsip akuntansi pemerintahan. Kelembagaan yang lemah hanya akan menjadikan SAP sebagai simbolisme tanpa makna fungsional.

Dari sisi eksternal, peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga sangat berpengaruh terhadap implementasi SAP. BPK sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah, mendorong daerah untuk memperbaiki sistem akuntansi dan pelaporannya. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK menjadi indikator penting yang menunjukkan keberhasilan penerapan SAP. DISPENDA Jambi sebagai bagian dari pemerintah daerah, tentunya juga berkepentingan untuk mendukung pencapaian opini WTP ini.

Lebih jauh, keberhasilan implementasi SAP juga dapat dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Semakin akuntabel dan transparan pengelolaan keuangan daerah, maka akan semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi keuangan daerah memungkinkan publik untuk mengakses informasi tentang penggunaan anggaran, sehingga mereka dapat mengevaluasi kinerja pemerintah secara objektif. Dalam jangka panjang, hal ini akan menghasilkan hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, indikator keberhasilan penerapan SAP tidak hanya dilihat dari sisi teknis pelaporan, tetapi juga dari bagaimana laporan keuangan dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Misalnya, dengan informasi keuangan yang akurat, DISPENDA dapat merancang strategi peningkatan pendapatan yang lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga pendapatan daerah meningkat dan anggaran untuk pelayanan publik menjadi lebih optimal.

Menurut studi manajemen publik, SAP berbasis akrual menjadi bagian dari reformasi sistem keuangan publik yang bertujuan untuk membuat sistem keuangan lebih transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Aplikasi akuntansi berbasis akrual telah terbukti dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan, meningkatkan efisiensi anggaran, dan meningkatkan kepercayaan publik di banyak negara. Oleh karena itu, Indonesia adalah anggota dunia yang mengadopsi metode ini

untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah.

Studi komparatif dari berbagai negara menunjukkan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual membawa dampak positif yang luas, mulai dari efisiensi fiskal, peningkatan transparansi, hingga peningkatan partisipasi publik. Namun, setiap negara menghadapi tantangan yang berbeda, tergantung pada tingkat kesiapan institusi dan budaya birokrasi yang berlaku. Di Indonesia, termasuk di Jambi, tantangan tersebut mencakup aspek teknis, kelembagaan, dan kultural, yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, implementasi SAP berbasis akrual di DISPENDA Pemerintah Daerah Jambi merupakan bagian penting dari upaya reformasi tata kelola keuangan publik di tingkat daerah. Penelitian ini berusaha untuk menggali secara mendalam bagaimana proses implementasi tersebut berlangsung, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, serta bagaimana dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga dapat menjadi referensi praktis bagi para pemangku kepentingan di tingkat lokal dan nasional.

Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat implementasi SAP berbasis akrual di DISPENDA Pemerintah Daerah Jambi dan bagaimana hal itu berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini akan melihat faktor-faktor teknis, kelembagaan, dan budaya yang

relevan dalam organisasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substansial untuk membangun kebijakan keuangan daerah yang lebih baik dan berorientasi pada hasil.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hubungan antara penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan kualitas layanan publik di DISPENDA Pemerintah Daerah Jambi. Penelitian kuantitatif dipilih untuk memperoleh data yang objektif, terukur, dan dapat dianalisis secara statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan dan pelayanan publik di DISPENDA Pemerintah Daerah Jambi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan kriteria:

- a. Pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan.
- b. Pegawai yang menggunakan sistem informasi akuntansi.
- c. Pegawai yang bertugas dalam pelayanan publik.

Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin atau berdasarkan ketersediaan dan keterjangkauan responden (misalnya 50 responden untuk analisis yang kuat). Jenis dan Sumber Data yaitu menggunakan data primer yaitu melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai DISPENDA. Data sekunder: Meliputi dokumen laporan keuangan, regulasi terkait

SAP, serta dokumentasi penerapan SAP di DISPENDA. Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup yang menggunakan skala Likert 5 poin (1 = Sangat Tidak Setuju, 5 = Sangat Setuju). Kuesioner terdiri dari beberapa bagian: (1)Tingkat penerapan SAP berbasis akrual. (2) Kualitas layanan publik (aspek transparansi, kecepatan, ketepatan, dan kepuasan masyarakat). (3) Faktor pendukung dan penghambat (kompetensi SDM, teknologi informasi, komitmen organisasi). Model Penelitian

$$Y=\alpha+\beta X+\epsilon$$

Keterangan:

Y = Kualitas Layanan Publik

X = Penerapan SAP Berbasis Akrual

α = Konstanta

β = Koefisien regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis deskriptif penelitian menunjukkan bahwa DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah) Pemerintah Daerah Jambi memiliki tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang tinggi. Hasil pengolahan kuesioner yang diisi oleh pejabat fungsional dan struktural di bidang keuangan dengan skor rata-rata 4,21 pada skala Likert 1–5 menunjukkan adanya penerapan yang cukup baik terhadap dasar-dasar SAP berbasis akrual.

1. Uji Validitas

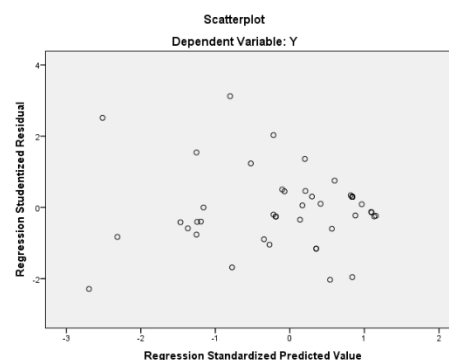
Hasil tes validitas menunjukkan bahwa semua pertanyaan pada variabel X1 valid dengan nilai signifikan di bawah 0,05 dan dengan nilai r hitung yang lebih besar dari r

tabel, yaitu 0,2353. Hasil tes validitas menunjukkan bahwa semua pertanyaan pada variabel X2 valid dengan nilai signifikan di bawah 0,05 dan dengan nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel, yaitu 0,2353. Hasil tes validitas menunjukkan bahwa semua pertanyaan pada variabel X3 valid dengan nilai signifikan di bawah 0,05 dan dengan nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel, yaitu 0,2353. Hasil tes validitas menunjukkan bahwa semua pertanyaan pada variabel X4 valid dengan nilai signifikan di bawah 0,05 dan dengan nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel, yaitu 0,2353. Hasil tes validitas menunjukkan bahwa semua pertanyaan pada variabel X4 valid dengan nilai signifikan di bawah 0,05 dan dengan nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel, yaitu 0,2353.

2. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas; nilai VIF semua variabel lebih kurang dari 10, dan nilai toleransi kurang dari 0,1.

3. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tidak ada heteroskedastisitas berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada gambar scatterplot titik menyebar artinya.

4. Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan nilai a , 4.906 menunjukkan bahwa variabel X belum memengaruhi variabel Y , atau bahwa variabel X belum memengaruhi variabel Y . Dalam kasus di mana tidak ada variabel independen, variabel dependen tidak mengalami perubahan.

Setiap peningkatan pada satu variabel kualitas menunjukkan bahwa:

- b_1 (nilai koefisien regresi x_1) sebesar - 0.122 menunjukkan bahwa variabel X_1 berpengaruh negatif terhadap Y
- b_2 (nilai koefisien regresi x_2) sebesar 0.004 menunjukkan bahwa variabel X_2 berpengaruh terhadap Y
- b_3 (nilai koefisien regresi x_3) sebesar - 0.114 menunjukkan bahwa variabel X_3 berpengaruh terhadap Y
- b_4 (nilai koefisien regresi x_4) sebesar

5. Uji Koefisien Determinan

Berdasarkan uji determinan, nilai R square adalah 0.741, yang menunjukkan bahwa variabel X memiliki pengaruh 74,1% terhadap variabel Y .

6. Uji F

Berdasarkan hasil uji F , dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel X_1 , X_2 , dan X_4 berdampak pada variabel Y . Nilai t hitung 32.213 lebih besar dari t tabel, yaitu 3.20.

Tingkat Penerapan SAP di DISPENDA Jambi

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa DISPENDA Pemerintah Daerah Jambi menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan skor rata-rata 4,2 (skala Likert 1–5). Hasil ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip SAP

telah diterapkan dengan baik, terutama dalam hal pencatatan hak dan kewajiban berbasis akrual.

Kualitas Layanan Publik

Kualitas layanan publik yang diberikan DISPENDA Jambi dinilai baik dengan skor rata-rata 4,35 pada aspek transparansi, kecepatan, ketepatan, dan kepuasan masyarakat. Tingginya skor ini mencerminkan responsivitas instansi dalam memenuhi kebutuhan publik.

Analisis Statistik

Uji Validitas bahwa seluruh item pertanyaan pada semua variabel (SAP, SDM, TI, Komitmen Organisasi, dan Kualitas Layanan Publik) valid dengan nilai signifikansi $< 0,05$ dan koefisien korelasi $> 0,2353$. Uji Normalitas bahwa Data berdistribusi normal berdasarkan histogram yang membentuk kurva normal. Uji Multikolinearitas: Tidak ditemukan multikolinearitas ($VIF < 10$ dan toleransi $> 0,1$). Uji Heteroskedastisitas: Tidak terdapat heteroskedastisitas berdasarkan pola acak pada scatterplot.

Pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas Layanan Publik

Komitmen Organisasi (X_4) memiliki pengaruh positif paling signifikan (koefisien 1,009). Teknologi Informasi (X_3) dan SAP (X_1) berpengaruh negatif, namun tidak signifikan secara praktis. Koefisien Determinasi (R^2): 74,1% variasi kualitas layanan publik dapat dijelaskan oleh variabel independen.

7. Uji Hipotesis (Uji t)

SAP (X_1), SDM (X_2), TI (X_3), dan Komitmen Organisasi (X_4) berpengaruh

signifikan terhadap kualitas layanan publik (sig. < 0,05). Komitmen Organisasi (X4) memiliki nilai t-hitung tertinggi (11,355), menunjukkan peran dominan. Faktor Pendukung dan Penghambat. Pendukung yaitu (a) Kompetensi SDM yang memadai. (b) Sistem informasi akuntansi terintegrasi. (c) Komitmen organisasi yang kuat. Penghambat yaitu (a) Keterbatasan pemahaman teknis SAP oleh sebagian aparatur. (b) Infrastruktur teknologi yang belum optimal.

Implikasi Praktis

Penerapan SAP berbasis akrual berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan, yang berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat, dan Laporan keuangan yang akurat memungkinkan DISPENDA merancang strategi peningkatan pendapatan daerah secara efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat Penerapan SAP di DISPENDA Pemerintah Daerah Jambi berada pada kategori tinggi (skor rata-rata 4,21), menunjukkan bahwa prinsip akuntansi berbasis akrual telah diimplementasikan dengan baik, terutama dalam pencatatan hak dan kewajiban.
2. Kualitas Layanan Publik dinilai baik (skor rata-rata 4,35) dengan indikator transparansi, kecepatan, ketepatan, dan kepuasan masyarakat yang tinggi.

3. Pengaruh Penerapan SAP terhadap kualitas layanan publik signifikan, dengan komitmen organisasi (X4) sebagai faktor dominan (koefisien 1,009). Sementara itu, teknologi informasi (X3) dan SAP (X1) memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan secara praktis.
4. Faktor Pendukung utama meliputi kompetensi SDM, sistem informasi terintegrasi (SIPKD), dan komitmen organisasi. Hambatan utama adalah keterbatasan pemahaman teknis SAP dan infrastruktur teknologi yang belum optimal.
5. Model regresi ($R^2 = 74,1\%$) menunjukkan bahwa 74,1% variasi kualitas layanan publik dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada penerbit dan almamater Universitas Terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Almukaromah, D. (2023). Pengaruh Pemahaman SAP dan Pemanfaatan SIA terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 8(2), 134–145.
- Aprsiansyah, H., Syafriandi, D., & Firmansyah, M. (2020). Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo. *Jurnal Akuntansi dan Riset*, 6(1), 78–90.
- Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Halim, A. (2016). Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik: Teori dan Praktik (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Nurhasniwati, H., Handayani, D., & Desfiandi. (2024). Determinasi Implementasi SAP Berbasis Akrua: Studi pada BPKAD Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja*, 10(1), 45–58.
- Octaviana, A. R. (2023). Pengaruh Implementasi SAP, Kompetensi SDM, Teknologi Informasi, dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Repository Universitas Jambi.
- Prasojo, E. (2019). Reformasi Administrasi Publik dan Tata Kelola Pemerintahan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Riyanto, B. (2015). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohmah, N. F. (2018). Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Intizam, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 1-11
- Saputra, F., & Siregar, A. (2022). Penerapan SAP dan Pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dengan Komitmen Organisasi sebagai Moderasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Unja*, 9(1), 50–63.